

Analysis Of The Regional Revenue And Expenditure Budget Realization Report In The Bengkayang Regency Government 2022 – 2024 (Case Study Of Bengkayang Regency, West Kalimantan Province)

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Bengkayang 2022 – 2024 (Studi Kasus Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat)

Titania Salsa Mayora¹, Tutut Dewi Astuti²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta^{1,2}
titaniasalsamayora@gmail.com¹, tutut@mercubuana-yogya.ac.id²

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study systematically evaluates the monetary performance of the Bengkayang District Government through three main indicators, namely effectiveness, independence, and budget efficiency in the 2022–2024 period. The findings of the research indicate that regional revenue realisation is able to achieve a good level of effectiveness, reflecting the municipal administration's competence in harnessing potential financial resources in line with strategic plans is still constrained. The extent of budgetary self-sufficiency is low, evidenced by a top-down interaction model where national governance continues to play a leading role in funding local operations. Meanwhile, expenditure efficiency indicators show a trend that is not yet optimal, and even tends to experience waste, especially in the last fiscal year. These findings indicate that although revenue targets were largely achieved, budget utilisation did not fully reflect the principles of efficiency and accountability. Therefore, a more adaptive and sustainable fiscal strategy is needed to strengthen regional financial structures and foster more independent fiscal autonomy in the future.

Keywords: Effectiveness, Regional Independence, Spending Efficiency, Regional Finance, Bengkayang Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini secara sistematis mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui tiga indikator utama, yakni efektivitas, kemandirian, dan efisiensi anggaran dalam periode 2022–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mampu mencapai tingkat efektivitas yang baik, mencerminkan kapasitas otoritas lokal dalam menggerakkan potensi penyetujuan yang sesuai terhadap perencanaan. Namun, tingkat kemandirian fiskal masih tergolong sangat rendah, yang ditunjukkan oleh model keterkaitan bersifat direktif, dengan otoritas nasional yang tetap memegang kendali utama dalam menopang pembiayaan kegiatan daerah. Sementara itu, indikator efisiensi belanja memperlihatkan tren yang belum optimal, bahkan cenderung mengalami pemborosan, terutama pada tahun anggaran terakhir. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun target pendapatan sebagian besar tercapai, penggunaan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan keuangan negara yang lebih optimal adaptif dan berkelanjutan untuk memperkuat struktur keuangan daerah serta menumbuhkan otonomi fiskal yang lebih mandiri di masa mendatang.

Kata Kunci: Efektivitas, Kemandirian Daerah, Efisiensi Belanja, Keuangan Daerah, Kabupaten Bengkayang.

1. Pendahuluan

Anggaran merupakan representasi target kinerja yang direncanakan untuk dicapai dalam suatu periode tertentu dan disajikan dalam bentuk nilai keuangan (Mardiasmo, 2018). Sementara itu, proses penyusunan anggaran dikenal sebagai penganggaran. Dalam konteks pelaksanaan program atau kegiatan, anggaran menjadi komponen krusial yang memerlukan rancangan yang terstruktur supaya sasaran yang diinginkan bisa direalisasikan. Baik di sektor pemerintahan maupun organisasi publik, anggaran berfungsi sebagai instrumen utama dalam

mewujudkan target-target tertentu selama kurun waktu tertentu. Berlainan dengan sektor independen yang orientasi utamanya yaitu memperoleh pendapatan dan di mana informasi anggaran bersifat tertutup, sektor publik menuntut keterbukaan anggaran. Dalam sistem pemerintahan, anggaran yang telah disusun harus dipublikasikan agar masyarakat dapat mengakses, mengevaluasi, dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Tingkat transparansi ini memungkinkan adanya reformasi dalam manajemen administrasi publik, khususnya pada sistem penganggaran yang lebih akuntabel dan partisipatif.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dirancang seoptimal kiranya dapat dijadikan pijakan dalam menetapkan kebijakan, pengalokasian, serta distribusi sumber daya publik yang pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. APBD merupakan naskah perencanaan program tahunan administrasi wilayah mencakup seluruh aspek penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Tujuan utama penyusunan APBD adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh komponen dalam APBD disusun dalam bentuk satuan mata uang dan wajib memperoleh izin DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melalui proses legislasi yang dituangkan dalam peraturan daerah sebagai bentuk legitimasi hukum (Badrudin, 2017).

Pemerintah daerah merupakan entitas publik yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Sebagai organisasi publik, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama. Salah satu upaya utamanya adalah melalui pemanfaatan seefisien mungkin terhadap berbagai potensi yang dimiliki yang tersedia di daerah tersebut. Dalam konteks keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi elemen penting karena berasal dari potensi ekonomi lokal yang dikelola sendiri. Makin tinggi sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap keseluruhan pendapatan wilayah, semakin tinggi pula kemandirian fiskal dan kapasitas administrasi wilayah dalam menyediakan anggaran untuk kegiatan konstruksi dan menyediakan layanan publik secara berkelanjutan (Firdausy, 2017).

Tujuan utama dari pelaksanaan desentralisasi serta prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengelola sistem penganggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan tata kelola anggaran yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun wilayahnya secara mandiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, instansi regional dalam menopang pendanaan infrastruktur dan yang menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, realisasi belanja daerah perlu difokuskan pada program-program yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga anggaran benar-benar menjadi alat untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Sebuah aktivitas operasional dianggap efisien bila pelaksanaannya berhasil memenuhi target serta maksud akhir dari ketentuan yang telah ditentukan, atau dengan kata lain, dilakukan secara *spending wisely*. Salah satu ukuran efektivitas dapat dilihat dari rasio pencapaian tujuan, di mana nilai yang mendekati 1 atau setara dengan 100% menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Indikator efektivitas mencerminkan sejauh mana hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) dari suatu program mampu menjawab tujuan yang telah dirumuskan. Sementara itu, efisiensi mengacu pada perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Suatu kegiatan dinilai efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin (Mardiasmo, 2022).

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya yang cukup besar, sehingga mampu merealisasikan pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan. Dalam proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pemerintah daerah tidak dapat melepaskan diri dari tahapan pemrograman dan penganggaran. Kedua proses tersebut memiliki keterkaitan yang mendalam

dan sukar untuk dipisahkan, lantaran pemrograman berfungsi sebagai dasar perencanaan kegiatan, sementara penganggaran adalah instrumen untuk mewujudkannya dalam bentuk alokasi dana. Oleh karena itu, setiap rencana program dan pembangunan yang telah disusun harus dikategorikan secara tepat dalam struktur APBD agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 - 2024

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase
2022	Rp. 1.111.193.961.007,00	Rp. 1.071.419.191.917,11	96%
2023	Rp. 1.293.830.501.667,00	Rp. 1.250.790.429.072,62	97%
2024	Rp. 1.236.726.537.558,00	Rp. 1.293.562.950.631,00	105%

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan Tabel 1 laporan realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.071.419.191.917,11, tahun 2023 sebesar Rp. 1.250.790.429.072,62 dan tahun 2024 sebesar Rp. 1.293.562.950.631,00.

Tabel 2. Laporan Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 – 2024

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
2022	Rp. 1.071.419.191.917,11	Rp. 83.744.525.713,42	8%
2023	Rp. 1.250.790.429.072,62	Rp. 82.011.588.604,47	7%
2024	Rp. 1.293.562.950.631,00	Rp. 117.010.911.559,00	9%

Sumber: BPAD Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan Tabel 2 laporan Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 83.744.525.713,42, tahun 2023 sebesar Rp. 82.011.588.604,47 dan tahun 2024 sebesar Rp. 117.010.911.559,00.

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 – 2024

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
2022	Rp. 1.441.632.929.931,00	Rp. 1.271.920.120.199,92	87%
2023	Rp. 1.395.289.830.249,00	Rp. 1.301.927.774.630,04	92%
2024	Rp. 1.295.315.665.886,00	Rp. 1.327.196.698.187,00	103%

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkayang

Tabel 3 menunjukkan tren realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang terus mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.271.920.120.199,92. Angka ini meningkat di tahun 2023 menjadi Rp1.301.927.774.630,04, dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi Rp1.327.196.698.187,00. Meski secara nominal terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD secara keseluruhan masih memperlihatkan pola fluktuatif. Fluktuasi tersebut mencerminkan ketidakstabilan dalam capaian pendapatan dan pengeluaran daerah yang tidak selalu bergerak secara konsisten. Situasi ini belum cukup untuk menggambarkan apakah kinerja pengelolaan APBD Kabupaten Bengkayang sudah optimal, atau masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji lebih mendalam.

Analisis realisasi ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD merupakan pihak yang menjalankan tugas pengaturan pemasukan dan pengeluaran daerah yang diberi amanah untuk menangani urusan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis berminat melakukan kajian dengan mengambil topik penelitian yaitu **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2022 - 2024”**.

2. Tinjauan Pustaka

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen resmi yang memuat Agenda anggaran tahunan otoritas lokal yang ditetapkan melalui regulasi wilayah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi sebagai dasar hukum dalam proses pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Selain itu, keberadaan APBD juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong keterbukaan serta meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik di tingkat daerah.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah elemen krusial dalam dokumen finansial negara yang menampilkan perbandingan antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan realisasi pelaksanaannya selama periode tertentu. Dokumen ini memberikan informasi mengenai capaian kinerja fiskal suatu entitas, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Penyusunan LRA bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar mampu memperkuat asas tanggung jawab dalam tata kelola finansial nasional maupun regional.

Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas dalam kurun waktu tertentu, baik secara periodik maupun pada titik waktu tertentu. Dalam ranah sektor publik, laporan keuangan memiliki fungsi strategis sebagai sarana guna merealisasikan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana public. Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan tanggung jawab penggunaan dana publik mendorong manajemen sektor publik untuk menyajikan data keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Penyusunan laporan keuangan yang kredibel menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik dimanfaatkan (Harahap, 2018).

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian

Dari segi Kategori informasi yang diterapkan, kajian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengolahan data berbentuk angka serta penerapan analisis statistik guna mengevaluasi dan menjelaskan hubungan antar variabel dalam skala yang luas (Beryman, 2020). Penelitian ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang mengedepankan objektivitas, sistematika, dan keterukuran. Tujuan utamanya adalah menghasilkan kesimpulan yang logis, sahih, serta dapat digeneralisasi, melalui pengujian hubungan antar variabel yang dianalisis secara rasional.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sebagai jenis pendekatannya. Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mengetahui nilai sebuah unsur ditelaah secara tersendiri, baik tunggal maupun jamak, tanpa menautkannya atau membandingkannya dengan unsur lainnya. Lewat pendekatan ini, informasi yang dikumpulkan akan ditampilkan secara ringkas, terorganisir, dan teratur sehingga dapat menyajikan ilustrasi yang terang mengenai hal tersebut inti informasi yang terkandung dalam kumpulan data tersebut. Penelitian deskriptif sangat berguna untuk memahami karakteristik atau kondisi suatu fenomena berdasarkan fakta empiris yang ada.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan proses riset. Penentuan lokasi dianggap sebagai tahap yang krusial dalam penelitian kualitatif, karena kualitas data sangat ditentukan oleh kesesuaian antara lokasi dan fokus kajian. Oleh sebab itu, pemilihan lokasi wajib dilaksanakan secara seksama dengan memikirkan aneka hal, agar pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara efektif dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Lokasi yang relevan dengan topik penelitian harus dipilih oleh peneliti, sehingga informasi yang valid dapat diperoleh dan dimanfaatkan dalam proses analisis serta penyelesaian masalah secara mendalam.

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang yang terletak di Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 – 2024.

Jenis Data dan Sumber Data

Pada riset ini, informasi tidak langsung digunakan dimanfaatkan sebagai sumber informasi utama. Pemilihan data sekunder dilakukan karena penelitian bergantung pada informasi yang telah dihimpun dan dipublikasikan oleh lembaga resmi dalam bentuk dokumen, seperti Laporan Realisasi Anggaran serta dokumen relevan lainnya (Sugiyono, 2018). Melalui jenis data ini, proses analisis dapat dilakukan secara sistematis tanpa perlu dilakukannya pengumpulan data langsung dari responden. Adapun dokumen informasi yang ditelaah dalam studi ini berupa Catatan Pelaksanaan Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk periode tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dianggap sebagai salah satu tahap cukup efisien ketika pelaksanaan penelitian, mengingat esensi utama dari suatu penelitian adalah tersedianya data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi telah diterapkan sebagai metode pengumpulan data. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013), dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan tertulis, seperti buku, dokumen resmi, catatan numerik, gambar, serta laporan-laporan yang mendukung kepentingan penelitian. Data pada penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024, yang telah disediakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Data

Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dapat diartikan sebagai seluruh penerimaan yang telah masuk ke kas daerah dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut. Secara umum, pemasukan ini dibagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dari transfer, serta penghasilan sah lainnya. Seluruh dana yang diterima dicatat melalui rekening kas daerah yang berfungsi menambah modal dana milik pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pemasukan ini bersifat tetap, sehingga tidak menimbulkan kewajiban pengembalian dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penerimaan ini menjadi hak penuh yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam upaya menjalankan program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jenis penerimaan yang diperoleh dari kekuatan ekonomi yang ada pada suatu kawasan, di mana penghimpunannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam aturan lokal dan hukum nasional. PAD menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, tanpa ketergantungan penuh pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di bawah ini disajikan informasi mengenai realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Tabel 4. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2022 – 2024

Keterangan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 21,680,313,511.30	Rp 20,673,428,996.10	Rp 28,638,070,468.00
Restribusi Daerah	Rp 3,543,323,718.00	Rp 1,198,245,500.00	Rp 4,453,206,016.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 5,421,735,374.00	Rp 6,087,613,737.00	Rp 5,842,377,263.00
Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 53,099,153,110.12	Rp 54,052,300,371.37	Rp 78,077,257,812.00
Jumlah	Rp 83,744,525,713.42	Rp 82,011,588,604.47	Rp 117,010,911,559.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkayang

Tabel 4 menunjukkan adanya dinamika dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama periode anggaran 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, realisasi PAD tercatat sebesar Rp83.744.525.713,42. Nilai ini mengalami penurunan pada tahun berikutnya, yakni tahun 2023, dengan capaian sebesar Rp82.011.588.604,47. Meskipun sempat menurun, tren tersebut berbalik arah pada tahun 2024 dengan peningkatan yang cukup signifikan, di mana realisasi PAD mencapai Rp117.010.911.959,00. Fluktuasi ini menggambarkan adanya tantangan sekaligus peluang dalam optimalisasi potensi sumber daya lokal untuk mendukung pendapatan daerah secara berkelanjutan.

2. Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merujuk pada penerimaan yang bersumber dari lembaga berbeda, seperti institusi pusat atau pemerintahan regional lainnya, yang diberikan guna menunjang pelaksanaan desentralisasi fiskal. Jenis pendapatan ini meliputi dana perimbangan serta berbagai skema transfer lainnya yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan provinsi sebagai bentuk dukungan terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan daerah, transfer ini memainkan peran penting dalam mendanai fungsi pelayanan publik dan pembangunan. Adapun data realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran 2022 hingga 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. Laporan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bengkulu 2022 – 2024

Keterangan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 29,194,922,241.00	Rp 18,517,790,748.00	Rp 26,815,465,029.56
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp 26,717,461,159.00	Rp 45,431,746,782.00	Rp 16,596,517,920.44
Dana Alokasi Umum	Rp 542,388,736,000.00	Rp 578,328,041,000.00	Rp 596,676,204,750.00
Dana Alokasi Khusus	Rp 222,313,183,237.00	Rp 339,340,296,514.00	Rp 358,195,302,000.00
Jumlah	Rp 820,614,302,637.00	Rp 981,617,875,044.00	Rp 998,283,489,700.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Bengkulu mengalami peningkatan yang stabil dalam kurun waktu tiga tahun secara berkelanjutan. Pada periode anggaran 2022, jumlah yang diterima sebesar Rp820.614.302.637,00. Jumlah ini melonjak signifikan di tahun 2023 menjadi Rp981.617.875.044,00, dan kembali naik pada tahun 2024 mencapai Rp998.283.489.700,00. Tren kenaikan ini mencerminkan komitmen yang terus menguat dari pemerintah pusat dan provinsi dalam mendukung stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di tingkat daerah. Peningkatan tersebut juga menunjukkan bahwa Bengkulu mampu mempertahankan kepercayaan fiskal melalui kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3. Realisasi Pendapatan Lain – lain Yang Sah

Penerimaan tambahan yang legal merupakan komponen krusial dalam susunan pemasukan wilayah yang berasal dari prakarsa serta langkah taktis otoritas lokal, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pendapatan ini berfungsi sebagai pelengkap dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) beserta pemasukan transfer, juga digunakan untuk mendukung berbagai program belanja daerah yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi oleh dua sumber utama tersebut. Pemerintah Kabupaten Bengkulu turut memanfaatkan kategori ini sebagai alternatif pendanaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Adapun data realisasi pendapatan lain-lain yang sah selama tahun anggaran 2022 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Laporan Realisasi Pendapatan Lain – lain Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bengkulu 2022 – 2024

Keterangan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus	Rp 105,596,918,000.00	Rp 120,674,998,000.00	Rp 117,183,948,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pem	Rp 58,123,955,596.65	Rp 66,485,967,424.15	Rp 61,084,601,372.00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Hibah dan Lainnya	Rp 3,339,489,970.04	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 167,060,363,566.69	Rp 187,160,965,424.15	Rp 178,268,549,372.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu

Fluktuasi diperlihatkan oleh realisasi pendapatan lain-lain yang sah Pemerintah Kabupaten Bengkulu sepanjang tahun anggaran 2022 hingga 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel

6. Pada tahun 2022, nilai pendapatan tersebut telah dicatat sebesar Rp167.060.363.556,69. Peningkatan kemudian telah dialami pada tahun 2023, sehingga jumlahnya menjadi Rp187.160.965.424,15. Namun, pada tahun 2024, nilai tersebut kembali mengalami penurunan dan dicatat sebesar Rp178.268.549.372,00. Pergeseran angka ini telah dipengaruhi oleh dinamika pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan sah lainnya, yang turut ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi daerah.

Realisasi Belanja Daerah

1. Realisasi Belanja Operasi

Pengeluaran rutin merupakan biaya harian yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan yang berdampak sementara. Berikut anggaran dan realisasi belanja operasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2024.

Tabel 7. Laporan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2024

Keterangan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	Rp 393,032,641,585.49	Rp 441,835,460,255.06	Rp 483,964,493,977.52
Belanja Barang dan Jasa	Rp 340,253,086,263.73	Rp 333,209,416,910.88	Rp 289,050,338,998.60
Belanja Bunga	Rp 6,329,704,866.00	Rp 12,298,958,351.00	Rp 10,910,497,984.48
Belanja Hibah	Rp 14,316,128,500.00	Rp 36,432,237,000.00	Rp 58,885,377,535.08
Bantuan Sosial	Rp 3,586,758,923.00	Rp 2,020,500,000.00	Rp 2,495,156,073.33
Jumlah	Rp 757,518,320,138.22	Rp 825,796,572,516.94	Rp 845,305,864,569.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan Tabel 7, realisasi belanja operasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran 2022 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, nilai realisasi belanja operasi tercatat sebesar Rp757.518.320.138,22. Jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi Rp825.796.572.516,94, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp845.305.864.569,00.

2. Realisasi Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat ekonomi dari satu tahun anggaran. Berikut adalah data realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Tabel 8. Laporan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2024

Keterangan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Belanja Modal Tanah	Rp 749,171,600.00		Rp 817,358,370.30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 62,596,758,560.70	Rp 48,642,833,726.00	Rp 43,727,451,190.32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 54,710,736,624.00	Rp 108,536,640,669.00	Rp 100,469,226,324.69
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 224,507,154,643.00	Rp 132,363,163,381.10	Rp 152,874,443,250.76
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 4,789,570,400.00	Rp 8,239,867,400.00	Rp 6,865,810,310.49
Belanja Aset Lainnya		Rp 108,500,000.00	Rp 444,642,953.44
Jumlah	Rp 347,353,391,827.70	Rp 297,891,005,176.10	Rp 305,198,932,400.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkayang

Tabel 8 menunjukkan bahwa realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama tahun anggaran 2022 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, belanja modal tercatat sebesar Rp347.353.391.827,70, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp297.891.005.176,10. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan kembali menjadi Rp305.198.932.400,00.

3. Realisasi Belanja Tak Terduga

Pengeluaran tidak terencana adalah bentuk pembiayaan anggaran yang disediakan untuk menutupi aktivitas yang bersifat insidental dan tidak lazim, seperti penanggulangan bencana alam maupun krisis sosial, serta keperluan mendesak lainnya yang penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan pusat maupun daerah. Berikut disajikan data realisasi belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Tabel 9. Laporan Realiasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2024

Keterangan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Belanja Tak Terduga	Rp 667,781,000.00	Rp 1,659,180,592.00	Rp 2,835,000,000.00
Jumlah	Rp 667,781,000.00	Rp 1,659,180,592.00	Rp 2,835,000,000.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkayang

Tabel 9 memperlihatkan bahwa realisasi belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama tahun anggaran 2022 hingga 2024 menunjukkan kemajuan secara berkala tahunnya. Pada tahun 2022, realisasi belanja tak terduga tercatat sebesar Rp667.781.000,00. Angka tersebut meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp1.659.180.592,00, dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi Rp2.835.000.000,00.

4. Realisasi Transferan Bantuan dan Bagi Hasil ke Desa

Transfer bantuan dan dana bagi hasil ke desa merupakan alokasi dana yang berasal dari pendapatan pemerintah pusat dan dialokasikan sebagian kepada desa. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kebutuhan desa, termasuk kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan sosial, serta program pemberdayaan masyarakat. Adapun realisasi penyaluran dana transfer bantuan dan bagi hasil ke desa oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 10. Laporan Realisasi Transferan Bantuan Dan Bagi Hasil Ke Desa Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2024

Keterangan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Transferan Bantuan dan Bagi Hasil Ke Desa	Rp 2,580,131,910.00	Rp 3,033,132,640.00	Rp 173,856,901,218.00
Jumlah	Rp 2,580,131,910.00	Rp 3,033,132,640.00	Rp 173,856,901,218.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkayang

Tabel 10 memperlihatkan bahwa realisasi transfer bantuan dan bagi hasil ke desa oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama tahun anggaran 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, realisasi mencapai Rp. 2.580.131.910,00, meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 3.033.132.640,00, dan kembali naik pada tahun 2024 sebesar Rp. 173.856.901.218,00.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Ini merupakan ringkasan pelaksanaan belanja negara Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2022 – 2024.

Tabel 11. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi 2022
Pendapatan	Rp 1,111,193,961,007.00	Rp 1,071,419,191,917.11
Pendapatan Asli Daerah	Rp 85,675,704,927.00	Rp 83,744,525,713.42
Pendapatan Transfer	Rp 858,836,736,708.00	Rp 820,614,302,637.00
Lain - lain Pendapatan Yang Sah	Rp 166,681,519,372.00	Rp 167,060,363,566.69
Belanja	Rp 1,277,682,899,931.00	Rp 1,108,119,624,875.92
Belanja Operasi	Rp 826,180,831,379.00	Rp 757,518,320,138.22
Belanja Modal	Rp 447,507,990,222.00	Rp 347,353,391,827.70
Belanja Tak Terduga	Rp 1,335,000,000.00	Rp 667,781,000.00
Transferan Bantuan Keuangan	Rp 2,659,078,330.00	Rp 2,580,131,910.00
Pembiayaan	Rp 330,438,968,924.00	Rp 323,826,505,537.15
Penerimaan Daerah	Rp 345,762,778,075.00	Rp 336,326,505,537.15
Pengeluaran Daerah	Rp 15,323,809,151.00	Rp 12,500,000,000.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan Tabel 11, laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022 menunjukkan adanya perbedaan antara nilai anggaran dan realisasinya. Pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp. 1.111.193.961.007,00, sementara realisasinya hanya mencapai Rp. 1.071.419.191.917,11. Untuk belanja, anggaran sebesar Rp. 1.277.682.899.931,00 dan realisasi tercatat sebesar Rp. 1.108.624.875,92. Sedangkan pada pos pembiayaan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 330.438.968.924,00 dengan realisasi sebesar Rp. 323.826.505.537,15.

Tabel 12. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023

Keterangan	Anggaran 2023	Realisasi 2023
Pendapatan	Rp 1,293,830,501,667.00	Rp 1,250,790,429,072.62
Pendapatan Asli Daerah	Rp 99,592,953,698.00	Rp 82,011,588,604.47
Pendapatan Transfer	Rp 1,003,133,183,038.00	Rp 981,617,875,044.00
Lain - lain Pendapatan Yang Sah	Rp 191,104,364,931.00	Rp 187,160,965,424.15
Belanja	Rp 1,218,706,813,509.00	Rp 1,125,346,758,285.04
Belanja Operasi	Rp 880,136,259,065.00	Rp 825,796,572,516.94
Belanja Modal	Rp 335,635,554,444.00	Rp 297,891,005,176.10
Belanja Tak Terduga	Rp 2,935,000,000.00	Rp 1,659,180,592.00
Transferan Bantuan Keuangan	Rp 3,033,132,640.00	Rp 3,033,132,640.00
Pembiayaan	Rp 101,459,328,582.00	Rp 101,459,328,582.34
Penerimaan Daerah	Rp 148,325,577,254.00	Rp 148,325,577,254.34
Pengeluaran Daerah	Rp 46,866,248,672.00	Rp 46,866,248,672.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkayang

Mengacu pada Tabel 12, laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu tahun 2023 memperlihatkan adanya perbedaan antara nilai anggaran dan realisasi. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 1.293.830.501.667,00, namun realisasinya hanya mencapai Rp. 1.250.790.429.072,62. Untuk belanja, nilai anggaran sebesar Rp. 1.218.706.813.509,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.125.346.758.285,04. Sementara pada pos pembiayaan, dari total anggaran Rp. 101.459.328.582,00, yang terealisasi sebesar Rp. 101.459.328,34.

Tabel 13. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024

Keterangan	Anggaran 2024	Realisasi 2024
Pendapatan	Rp 1,236,726,537,558.00	Rp 1,293,562,950,631.00
Pendapatan Asli Daerah	Rp 117,549,408,742.00	Rp 117,010,911,559.00
Pendapatan Transfer	Rp 925,748,042,000.00	Rp 998,283,489,700.00
Lain - lain Pendapatan Yang Sah	Rp 193,429,086,816.00	Rp 178,268,549,372.00
Belanja	Rp 1,118,134,046,237.00	Rp 1,153,339,796,969.00
Belanja Operasi	Rp 928,600,687,542.00	Rp 845,305,864,569.00
Belanja Modal	Rp 186,698,358,695.00	Rp 305,198,932,400.00
Belanja Tak Terduga	Rp 2,835,000,000.00	Rp 2,835,000,000.00
Transferan Bantuan Keuangan	Rp 177,181,619,649.00	Rp 173,856,901,218.00
Pembiayaan	Rp 58,589,128,328.00	Rp 33,633,747,556.00
Penerimaan Daerah	Rp 102,955,377,000.00	Rp 75,000,000,000.00
Pengeluaran Daerah	Rp 44,366,248,672.00	Rp 41,366,252,444.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan Tabel 13, laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan antara nilai anggaran dan realisasi. Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.236.726.537.558,00, namun realisasinya melebihi target yakni mencapai Rp. 1.293.562.950.631,00. Untuk belanja daerah, anggaran ditetapkan sebesar Rp. 1.118.134.046.237,00, sedangkan realisasinya mencapai Rp. 1.153.339.796.969,00. Sementara itu, pada pos pembiayaan, dari anggaran sebesar Rp. 58.589.128.328,00, yang terealisasi hanya Rp. 33.633.747.556,00.

Perhitungan dan Analisis Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Efektivitas Pendapatan Daerah

Efektivitas pendapatan daerah dapat diperhitungkan bersama rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PD}}{\text{Target Penerimaan PD}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas, bisa diperhitungkan efektivitas pendapatan daerah dengan rincian hasil perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas PD 2022} &: \frac{\text{Rp. 1.071.419.191.917,11}}{\text{Rp. 1.111.193.961.007,00}} \times 100\% \\
 &: 96\% \\
 \text{Efektivitas PD 2023} &: \frac{\text{Rp.1.250.790.429.072,62}}{\text{Rp. 1.293.830.501.667,00}} \times 100\% \\
 &: 97\% \\
 \text{Efektivitas PD 2024} &: \frac{\text{Rp. 1.293.562.950.631,00}}{\text{Rp. 1.236.726.537.558,00}} \times 100\% \\
 &: 105\% \\
 \text{Rata – rata Efektivitas PD 2022 – 2024} &: \frac{96\%+97\%+105\%}{3} \\
 &: 99\%
 \end{aligned}$$

2. Kemandirian Pendapatan Asli Daerah

Kemandirian pendapatan asli daerah dapat diperhitungkan bersama rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas, maka bisa diperhitungkan kemandirian pendapatan asli daerah dengan rincian hasil perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Kemandirian PAD 2022} &: \frac{\text{Rp. 83.744.525.713,42}}{\text{Rp. 1.071.419.191.917,11}} \times 100\% \\
 &: 8\% \\
 \text{Kemandirian PAD 2023} &: \frac{\text{Rp. 82.011.588.604,47}}{\text{Rp. 1.250.790.429.071,62}} \times 100\% \\
 &: 7\% \\
 \text{Kemandirian PAD 2024} &: \frac{\text{Rp.117.010.911.559}}{\text{Rp. 1.293.562.950.631,00}} \times 100\% \\
 &: 9\% \\
 \text{Rata - rata Kemandirian PAD 2022 – 2024} &: \frac{8\%+7\%+9\%}{3} \\
 &: 8\%
 \end{aligned}$$

3. Efesiensi Belanja Daerah

Efesiensi belanja daerah dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efesiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dengan rumus diatas, maka dapat diperhitungkan efesiensi belanja daerah dengan rincian hasil perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Efesiensi Belanja 2022} &: \frac{\text{Rp. 1.108.119.624.875,92}}{\text{Rp. 1.277.682.899.931,00}} \times 100\% \\
 &: 87\% \\
 \text{Efesiensi Belanja 2023} &: \frac{\text{Rp. 1.125.346.758.285,04}}{\text{Rp. 1.218.706.813.509,00}} \times 100\% \\
 &: 92\% \\
 \text{Efesiensi Belanja 2024} &: \frac{\text{Rp. 1.153.339.769.969,00}}{\text{Rp. 1.118134.046.237,00}} \times 100\% \\
 &: 103\%
 \end{aligned}$$

Rata – rata Efisiensi Belanja 2022 – 2024

$$: \frac{87\% + 92\% + 103\%}{3}$$

$$: 94\%$$

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pendapatan daerah, rasio kemandirian pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah maka penulis mendapatkan hasil pembahasan sebagai berikut.

Efektivitas Pendapatan Daerah

Dari hasil perhitungan efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2024 didapatkan ringkasan hasil perhitungan seperti pada tabel berikut.

Tabel 14. Ringkasan Efektivitas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2024

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase	Kriteria
2022	Rp 1,111,193,961,007.00	Rp 1,071,419,191,917.11	96%	Efektif
2023	Rp 1,293,830,501,667.00	Rp 1,250,790,429,072.62	97%	Efektif
2024	Rp 1,236,726,537,558.00	Rp 1,293,562,950,631.00	105%	Sangat Efektif
Rata - rata			99%	Efektif

Sumber: Diolah oleh peneliti

Menurut hasil evaluasi, tingkat keberhasilan pencapaian penerimaan wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama periode 2022–2024 tergolong baik. Pada tahun 2022 dan 2023, tingkat efektivitas masing-masing tercatat sebesar 96% dan 97%, yang masuk dalam kategori *efektif*. Sementara itu, pada tahun 2024, efektivitas mencapai 105%, yang termasuk dalam kategori *sangat efektif*. Rata-rata efektivitas selama tiga tahun tersebut sebesar 99%, yang tetap berada dalam kategori *efektif*. Temuan ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang mampu memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal dan selaras dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Kemandirian Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil perhitungan kemandirian pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2024 didapatkan ringkasan hasil perhitungan seperti pada tabel berikut.

Tabel 15. Ringkasan Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase	Kriteria	Pola Hubungan
2022	Rp 83,744,525,713.42	Rp 1,071,419,191,917.11	8%	Rendah Sekali	Instruktif
2023	Rp 82,011,588,604.47	Rp 1,250,790,429,072.62	7%	Rendah Sekali	Instruktif
2024	Rp 117,010,911,559.00	Rp 1,293,562,950,631.00	9%	Rendah Sekali	Instruktif
Rata - rata			8%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Diolah oleh peneliti

Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang masih berada pada kategori yang sangat rendah. Berdasarkan hasil analisis, persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah hanya mencapai 8% pada tahun 2022, menurun menjadi 7% di tahun 2023, dan sedikit meningkat

menjadi 9% di tahun 2024. Rata-rata selama tiga tahun tersebut hanya menyentuh angka 8%, yang secara keseluruhan masuk dalam klasifikasi masih amat minim dengan pola relasi yang bersifat direktif, menandakan bahwa otoritas lokal masih mengandalkan secara signifikan bimbingan serta dukungan dari otoritas nasional maupun wilayah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkayang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan otonomi fiskal secara mandiri. Kecilnya kontribusi PAD mencerminkan bahwa sumber pendapatan lokal belum tergarap secara optimal, baik dari sisi potensi pajak daerah, retribusi, maupun pengelolaan aset daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi, sehingga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang responsif tanpa terus-menerus bergantung pada sumber eksternal. Oleh karena itu, perlu strategi konkret untuk menggali potensi lokal sebagai sumber pendapatan alternatif guna memperkuat fondasi fiskal daerah ke depan.

Kondisi ini juga mencerminkan terbentuknya pola hubungan dalam kemampuan keuangan daerah yang cenderung mengarahkan, dengan dominasi otoritas nasional lebih kuat dibandingkan otonomi wilayah dalam membiayai aktivitas pemerintahan.

Efisiensi Belanja Daerah

Dari hasil perhitungan efisiensi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2024 didapatkan ringkasan hasil perhitungan seperti pada tabel berikut.

Tabel 16. Ringkasan Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2024

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Persentase	Kriteria
2022	Rp 1,277,682,899,931.00	Rp 1,108,119,624,875.92	87%	Cukup Efisien
2023	Rp 1,218,706,813,509.00	Rp 1,125,346,758,285.04	92%	Kurang Efisien
2024	Rp 1,118,134,046,237.00	Rp 1,153,339,796,969.00	103%	Tidak Efisien
Rata - rata			94%	Kurang Efisien

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan, efisiensi realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022 termasuk dalam kategori cukup efisien dengan persentase 87%. Pada tahun 2023, efisiensinya menurun ke kategori kurang efisien dengan nilai 92%, dan pada tahun 2024 semakin menurun ke kategori tidak efisien dengan nilai 103%. Rata-rata efisiensi belanja daerah selama periode 2022–2024 berada pada kategori kurang efisien dengan angka 94%. Temuan ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan anggaran, yang mencerminkan kecenderungan terjadinya pemborosan dalam pelaksanaan belanja daerah.

5. Penutup Kesimpulan

Merujuk pada telaah informasi dan ulasan yang telah dirancang sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2022 – 2024 dapat dikategorikan kedalam tingkat pendapatan daerah yang efektif.
2. Tingkat kemandirian pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2022–2024 masih berada pada kategori rendah sekali berpola hubungan instruktif, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang belum mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri.

3. Tingkat efisiensi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2022 – 2024 dikategorikan kedalam kriteria kurang efisien

Daftar Pustaka

- Ardhini dan Sri Handayani. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan. *Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Aryadi, Rudi (2021). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *ILMIAH Volume III No.2 halaman 1-13*.
- Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. (2022). Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintahan Daerah. *Edisi ketiga Salemba Empat*. Jakarta.
- Berliana, Sandra. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Bogor melalui Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian, *Skripsi Sarjana Universitas Djuanda*. Bogor.
- Beryman, T. (2020). *Statistical Methods in Research: A Guide for Social Science Researchers*. London: Routledge.
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. (2020). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018-2020, *GaneÇ Swara Edisi 32 D. Kartika, IC. Kusuma Analisis Ratio Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi PAD Khusus Vol. 4, No.3 Hal. 75*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). Deskripsi dan Analisis APDB 2023. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Jakarta Pusat.
- Dwirandra, A.A.N.B. (2017). Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012-2016. *Universitas Udayana*. Bali
- Halim dan Iqbal. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. (2022). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Salemba Empat Jakarta 2022. *Akuntansi Keuangan Daerah Book Review Salemba Empat*. Jakarta.
- Mahmudi, (2020). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *UPP STIM YKPN*. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. (2008). Akuntansi Pemerintahan. *Salemba Empat*. Jakarta.
- Norum, Nova Gatindra. (2017). Analisis Penilaian Kinerja dengan Pendekatan Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Tuban. *Skripsi Sarjana Universitas Negeri Malang*. Malang.
- Nurhayati, Tuti, (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Masa Otonomi (Studi Kasus Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2014-2016). *Skripsi Sarjana Universitas Hasanudin*. Sulawesi Tenggara.
- Pemerintah Kabupaten Bengkayang. (2024). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 – 2024. *Pemerintah Kabupaten Bengkayang*. Kalimantan Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.